



Perencanaan Skenario Program Bantuan Langsung Tunai untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya

Agnes Cipta Permatasari^{1*}, Anggraeny Puspaningtyas², Eddy Wahyudi³

¹⁻³ Ilmu Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anescipta@gmail.com

Abstract. *The main issues identified in this study include mistargeting of beneficiaries, weak inter-agency coordination, low community participation in the verification process, and a tendency among recipients to rely on cash assistance in a consumptive manner. This research analyzes the scenario planning of the Cash Transfer Program (BLT) in reducing poverty in Surabaya City, particularly in Krembangan District. The program is implemented based on Surabaya Mayor Regulation Number 130 of 2023, which serves as the legal foundation for the regional BLT scheme. Using the Scenario Planning TAIDA model (Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, and Acting) by Mats Lindgren and Bandhold (2003) as the analytical framework, this study examines the extent to which planning, decision-making, and implementation processes are able to respond to the socio-economic dynamics of the community. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that BLT plays a significant role in supporting low-income households and reducing poverty rates; however, challenges persist, including limited community engagement, weak inter-agency coordination, and non-productive use of assistance. The scenario planning approach is considered effective in helping the government design more adaptive, participatory, and sustainable policy strategies. It is expected that the BLT program will not only serve as a short-term intervention but also become a strategic instrument in promoting independence and improving the welfare of poor communities in Surabaya.*

Keywords: BLT; Policy; Poverty; Scenario Planning; Surabaya.

Abstrak. Masalah utama yang ditemukan adalah ketidaktepatan sasaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi, serta kecenderungan penerima bantuan untuk bergantung secara konsumtif pada BLT. Penelitian ini menganalisis tentang perencanaan skenario program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya, khususnya di Kecamatan Krembangan. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 sebagai dasar hukum penyelenggaraan BLT daerah. Menggunakan teori Scenario Planning model Taida (*Tracking, Analysing, Imaging, Deciding dan Acting*) dari Mats Lindgren dan Bandhold (2003) sebagai kerangka analisis untuk melihat sejauh mana proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan BLT mampu merespons dinamika sosial ekonomi masyarakat. Dengan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT berperan penting dalam membantu masyarakat miskin dan menurunkan angka kemiskinan, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat, koordinasi antarinstansi, dan pemanfaatan bantuan yang belum produktif. Pendekatan Scenario Planning dinilai mampu membantu pemerintah merancang strategi kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif dan berkelanjutan. Program BLT diharapkan tidak hanya menjadi intervensi jangka pendek, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Surabaya.

Kata kunci: BLT; Kebijakan; Kemiskinan; Perencanaan Skenario; Surabaya

1. LATAR BELAKANG

Masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat ialah bagaimana cara melakukan pengalokasian dan distribusi sumber daya dengan baik. Kemiskinan dan kesenjangan pada umumnya muncul dikarenakan cara mendistribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemiskinan menunjukkan keadaan dimana serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang

dimilikinya. Kemiskinan di Indonesia bukan lagi suatu masalah yang langka untuk dihadapi tapi kemiskinan ini sudah menjadi masalah yang sering dihadapi di Indonesia (Djaenal et al., 2021). Tingkat kemiskinan sering mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Tingkat pendidikan yang rendah ini juga menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak diantaranya yang bekerja hanya sebagai buruh tani atau bahkan menjadi kuli borongan yang dengan penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga (Mualifah, 2019). Selain itu kemiskinan juga disebabkan karena banyaknya jumlah penduduk yang mempunyai keterbatasan terhadap akses modal, sarana produksi, pemasaran, peningkatan kuantitas dan kualitas produk, selain itu juga pengaruh internal seperti fluktuasi harga BBM, tarif dan regulasi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa serta keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Nurvira, 2023).

Penjelasan kemiskinan jelas diatur dalam perundangan-undangan dan selanjutnya dilaporkan pada kementerian bidang kesejahteraan rakyat, selanjutnya dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan tidak hanya dilihat dari tenaga kerja pengangguran tetapi juga dilihat dari tingkat tenaga kerja yang berpenghasilan rendah (Hajra, 2022). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program antar kementerian atau lembaga pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Instruksi Presiden ini membagi menjadi tiga strategi utama yaitu, mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penurunan kantong kemiskinan. Pengurangan beban pengeluaran dilakukan melalui bantuan sosial, subsidi dan layanan publik gratis dan murah.

Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menangani kemiskinan, seperti masalah lingkungan, sanitasi, dan permukiman kumuh. Kota Surabaya memiliki kawasan padat penduduk yang sering kali diikuti



Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Surabaya, 2015- 2024.

oleh masalah permukiman tidak layak huni. Meskipun Kota Surabaya dikenal sebagai pusat ekonomi dan perdagangan di wilayah Jawa Timur akan tetapi masih terdapat sejumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis. Tanpa disadari Surabaya menjadi salah satu kota dengan angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Menurut data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Surabaya mencapai sekitar 180.000 jiwa, atau sekitar 6,2% dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Surabaya relatif lebih maju dibandingkan kota-kota lain di Jawa Timur, kemiskinan masih menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius (BPS Surabaya, 2024)

Selama periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya berkurang sebanyak 19,75 ribu jiwa, dari 136,37 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 116,62 ribu jiwa pada Maret 2024 atau mengalami penurunan sebesar 14,5 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kota Surabaya dalam rentang waktu satu tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 0,69 persen poin, dari 4,65 persen pada Maret 2023 menjadi 3,96 persen pada Maret 2024” (BPS Surabaya, 2024). Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya, sekaligus menegaskan bahwa dinamika kemiskinan di wilayah perkotaan dapat berubah dalam kurun waktu relatif singkat. Meskipun demikian, angka kemiskinan yang tersisa tetap menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan belum sepenuhnya teratasi, dan masih terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus.

Sehubungan dengan itu, agar bisa menurunkan tingkat persentase kemiskinan tentunya pemerintah melakukan berbagai usaha yang bersifat multidimensi dan terintegritas, mengingat kemiskinan adalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. “Salah satunya ialah dengan adanya perlindungan sosial berupa adanya Dana Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dari kondisi seperti yang saat ini terjadi (Kurniasih Anderesta, 2019). Upaya-upaya ini diatur tidak hanya untuk memberikan bantuan jangka pendek, akan tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan jangka panjang. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan, seperti tunjangan tunai, bantuan pangan, dan layanan kesehatan gratis. Tujuannya untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat tersebut serta untuk membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup (Melinda, 2023). Dengan adanya alokasi dana bantuan sosial dalam APBN dan APBD, pemerintah menunjukan komitmennya untuk memprioritaskan penanganan kemiskinan melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan.

BLT diperkenalkan secara langsung kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005 sebagai upaya menanggulangi kenaikan harga bagi golongan masyarakat miskin. Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla selang dirinya terpilih menjadi wakil presiden Indonesia pada tahun 2004 (Hafiz, 2022). Latar belakang diluncurkannya program BLT tidak lepas dari kondisi kemiskinan yang masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di kota-kota besar seperti Surabaya. Program BLT hadir sebagai respons cepat untuk membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian dan biaya pendidikan anak. Selain itu, program ini memiliki tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil. Program BLT dirancang untuk memberikan bantuan finansial langsung kepada masyarakat miskin dan rentan dengan tujuan untuk mengurangi masalah ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar mereka” (Nasution, 2025). Penerima BLT merupakan keluarga yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum seperti tabel dibawah. Dengan adanya penetapan persyaratan ini, diharapkan program BLT dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan

Tabel 1. Kriteria Masyarakat Miskin Menurut Standar BPS.

No	Variabel	Kriteria
1.	Luas lantai bangunan tempat tinggal	Kurang dari 8 (delapan) m ² /orang
2.	Jenis lantai bangunan tempat tinggal	Tanah/ bambu/ kayu murahan/ semen kualitas jelek
3.	Jenis dinding tempat tinggal	Bambu/ rumbia/ kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plester
4.	Fasilitas tempat buang air besar	Tidak punya atau MCK bersama
5.	Sumber penerangan utama	Bukan listrik
6.	Bahan bakar untuk masak	Kayu bakar/ arang/ minyak tanah
7.	Konsumsi daging/ susu / ayam per minggu	Tidak pernah mengonsumsi/ hanya satu kali per minggu
8.	Sumber air minum	Sumur/ sungai/ air hujan
9.	Pembelian pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga dalam setahun	Tidak pernah membeli/ hanya membeli satu stel dalam setahun
10.	Makan malam sehari untuk setiap anggota rumah tangga	Hanya satu/ dua kali makan dalam sehari
11.	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga	Tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD
12.	Sumber penghasilan rumah tangga	Petani dengan luas lahan 500 m ² , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 – per bulan

Sumber: (Irfan, 2025)

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kota Surabaya ditetapkan langsung oleh Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Sosial Kota Surabaya. BLT ini bersumber dari dana APBD Surabaya. Nominal BLT permakanan yaitu Rp.200.000 per bulan selama satu tahun, penyaluran BLT dilakukan secara bertahap di masing-masing kecamatan Dinas Sosial Kota Surabaya mencatat data keluarga miskin (Gamis) penerima BLT melibatkan RT dan RW untuk memastikan keakuratan data. Proses ini melibatkan verifikasi lapangan dan penggunaan aplikasi “ Si Keluarga Miskin” untuk menentukan kelayakan penerima bantuan berdasarkan kriteria kemiskinan. Pemerintahan Kota Surabaya menetapkan bahwa seseorang atau keluarga yang menerima salah satu bentuk bantuan sosial (BLT, PKH, atau BPNT) tidak diperbolehkan untuk menerima lebih dari satu jenis bantuan dalam bulan yang sama. Hal ini diatur oleh Pemkot Surabaya melalui Perwali No. 130 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa penerima BLT permakanan dari APBD hanya berasal dari keluarga miskin yang tidak menerima PKH atau BPNT dari Kementerian Sosial di waktu yang sama (Elaine, 2024).

Meski tingkat kemiskinan di Kota Surabaya menunjukkan penurunan yang signifikan dari 4,72% pada tahun 2022, menjadi 4,56% pada 2023 dan mencapai 3,96%. RPJMD Kota Surabaya menetapkan target penurunan lanjutan menjadi 3,71% pada 2025 dan 3,42% pada 2026 dengan menjadi target akhir periode” (RPJMD Kota Surabaya, 2021). Sehubungan dengan hal itu, tetapi intervensi bantuan sosial khususnya program permakanan yang dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai telah berubah menjadi lebih selektif dan berbasis data yang lebih ketat. Jumlah penerima BLT menjadi lebih sedikit tetapi cakupan dan efektivitas bantuan bertambah dengan memastikan hanya warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Berikut merupakan daftar penerima BLT dari pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 – 2025. Data tahun 2024 mencakup penyaluran penuh dalam 12 tahap, sedangkan data 2025 baru melaksanakan penyaluran hingga tahap ke 7 karena penyaluran terakhir baru dilaksanakan pada Agustus 2025. Jumlah penerima tidak selalu sama dengan jumlah yang tersalurkan karena penerima tidak bisa datang saat penyaluran, berpindah domisili atau mengundurkan diri secara sukarela, sehingga mereka belum diurus ulang untuk tetap menerima bantuan dan data belum sepenuhnya diperbarui.

Tabel 2 Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Pemkot Surabaya tahun 2024-2025

Jumlah Penerima 2024 Tahap 1-12	Jumlah Tersalurkan 2024 Tahap 1-12	Jumlah Penerima 2025 Tahap 1-7	Jumlah Tersalurkan 2025 Tahap 1-7
22.386	21.436	2.299	2.267

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2025 (Dinas Sosial Kota Surabaya)

Berikut merupakan data penerima BLT di Kecamatan Krembangan yang tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penerima terbanyak. Total penerima BLT di kecamatan ini mencapai 2.248 jiwa yang tersebar di lima kelurahan, yaitu Kelurahan Dupak, Kelurahan Kemayoran, Kelurahan Krembangan Selatan, Kelurahan Morokrembangan, Kelurahan Perak Barat. Tingginya jumlah penerima BLT di Kecamatan Krembangan menunjukkan bahwa kecamatan tersebut memiliki kerentanan sosial ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Surabaya. Penerima BLT di Kecamatan Krembangan yang paling tinggi yaitu Kelurahan Morokrembangan dengan jumlah 1.350 jiwa atau lebih dari setengah total penerima di kecamatan tersebut. Tingginya jumlah penerima BLT di Morokrembangan menunjukkan adanya faktor kepadatan penduduk atau keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dari kondisi tersebut menjadikan Morokrembangan sebagai salah satu wilayah prioritas dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Surabaya.

Tabel 3 Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Krembangan.

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
Krembangan	Dupak	204
Krembangan	Kemayoran	240
Krembangan	Krembangan Selatan	391
Krembangan	Morokrembangan	1.350
Krembangan	Perak Barat	63
Total		2.248

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2025 (Dinas Sosial Kota Surabaya)

Target ambisius RPJMD Kota Surabaya yang menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 3,42% pada tahun 2026 . Penurunan angka kemiskinan yang tercatat dari tahun 2022 hingga 2024 memang menunjukkan tren positif, tetapi belum cukup untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan memiliki jangka panjang yang stabil dan merata. Dengan adanya penyesuaian pendekatan bantuan sosial ini, muncul kebutuhan untuk merancang strategi perencanaan skenario program BLT yang adaptif terhadap perubahan fleksibel terhadap dinamika lokal dan tetap berpihak kepada masyarakat miskin. Dalam konteks tersebut, muncul kesenjangan penelitian (gap) yang perlu diperhatiakn, yakni terbatasnya kajian yang tidak hanya menilai implementasi BLT secara operasional, tetapi juga

mengembangkan perencanaan skenario kebijakan jangka panjang yang mampu mengantisipasi ketidakpastian sosial ekonomi, perbedaan karakteristik wilayah, serta kebutuhan masyarakat miskin secara spesifik. Dari kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai berbagai skenario kebijakan yang dapat dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketepatan sasaran, keberlanjutan pendanaan, integrasi dana lintas sektor, serta partisipasi masyarakat dalam proses identifikasi dan validasi penerima bantuan. Dengan menggunakan pendekatan skenario, pemerintah dapat merancang berbagai alternatif kebijakan dan respons yang sesuai dengan kondisi masyarakat di masa depan, sehingga program bantuan sosial, termasuk BLT, dapat dijalankan dengan lebih efektif dan berdampak luas dalam pengurangan kemiskinan, khususnya di Kota Surabaya.

Pemerintah juga berharap bahwa bantuan sosial ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menjadi landasan awal bagi kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Bantuan sosial bisa menjadi acuan menuju pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, sehingga keluarga penerima manfaat (KPM) tidak selamanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu meningkatkan kapasitas diri dan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, program bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan ketrampilan, akses permodalan dan pengembangan usaha mikro kecil agar hasilnya lebih komprehensif dan berdampak jangka panjang. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut perlu sistem pengelolaan bantuan sosial yang efektif, akuntabel dan adaptif dalam perubahan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan skenario dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Surabaya dengan studi di Kecamatan Krembangan. Menggunakan teori *Scenario Planning* model Taida (*Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting*) dari Lindgren & Bandhold, penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan kebijakan yang proaktif, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kelemahan program BLT sebelumnya serta merancang strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif dan partisipatif. Dengan demikian, BLT tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan sosial jangka panjang yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika kemiskinan perkotaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Perencanaan Skenario

Istilah *Scenario Planning* (perencanaan skenario) sudah relatif lama beredar namun memang masih belum banyak juga yang memahami dengan baik. Selain itu, pemanfaatan konsep perencanaan skenario juga dilakukan dalam beragam jenis kegiatan terutamanya bisnis dan manajemen. Sehingga tidak mengherankan ketika pemahamannya pun bisa beragam. Pakar manajemen Michael Porter (1985) menjelaskan perencanaan skenario sebagai pandangan tentang perubahan yang terjadi di masa depan. Sementara Peter Schwartz (1991) memaknainya sebagai cara memperoleh pandangan seseorang tentang alternatif keadaan masa depan yang memungkinkan keputusan dihasilkan dengan tepat. Perencanaan skenario berguna ketika mempertimbangkan aspek jangka panjang dan/atau perubahan tidak terduga yang dapat mengganggu kecenderungan sebelumnya (Mungkasa, 2023).

Metode Penyusunan Perencanaan Skenario

Menurut Mats Lindgren & Hans Bandhold (2003), Skenario Planing merujuk pada pendekatan analitis yang digunakan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan hasil dari keputusan kebijakan yang diambil. Ini melibatkan pengembangan serangkaian skenario yang menggambarkan kombinasi dari keadaan dan tindakan kebijakan yang berbeda, dengan tujuan untuk memahami bagaimana berbagai faktor pendorong dapat mempengaruhi situasi di masa depan. Adapun beberapa langkah penting dapat diidentifikasi dalam metode baru untuk menyusun skenario yang diusulkan dalam analisis skenario planning yang dinamakan sebagai TAIDA (*Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding, Acting*).

a. *Tracking* (Pelacakan)

Tracking adalah tahap awal dari Taida, dalam *tracking* dilakukan penelusuran terhadap kejadian yang sudah pernah terjadi. *Tracking* bertujuan untuk menciptakan gambaran yang jelas tentang konteks eksternal dan lingkungan strategis (Pinkan Martha et al., 2014) . Dalam konteks perencanaan skenario program BLT difokuskan pada upaya yang mengidentifikasi berbagai tren dan kekuatan pendorong yang mempengaruhi kondisi kemiskinan di Kota Surabaya. Pada tahap ini, penting untuk memahami perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun, persebaran wilayah kemiskinan, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat penerima bantuan. Selain itu, pelacakan juga mencakup data historis mengenai pelaksanaan program BLT, termasuk jumlah penerima, frekuensi penyaluran, dan efektivitas pelaksanaan program.

b. *Analyzing* (Analisis)

Pada tahap ini, fokusnya adalah memahami hubungan antara tren, kekuatan pendorong, dan ketidakpastian yang telah diidentifikasi. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor tersebut terhadap organisasi (Pinkan Martha et al., 2014). Di tahap ini dilakukan analisis terhadap seberapa besar dampak masing-masing faktor terhadap efektivitas program BLT dalam menanggulangi kemiskinan. Analisis juga dilakukan terhadap mekanisme distribusi bantuan yang selama ini berjalan, termasuk kelemahan dalam sistem pendataan dan verifikasi penerima. Selain itu, perlu dianalisis pula peran dari stakeholder terkait seperti dinas sosial, kelurahan, dan RT/RW dalam mendukung distribusi bantuan.

c. *Imaging* (Penggambaran)

Tahap ini adalah proses kreatif di mana berbagai skenario masa depan dikembangkan berdasarkan analisis sebelumnya. Penggambaran mencakup membayangkan kemungkinan-kemungkinan masa depan yang berbeda dengan narasi yang detail dan konsisten. Dalam tahap ini menciptakan sebuah visi (Pinkan Martha et al., 2014). Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, tahap ini membayangkan skenario-skenario yang mungkin terjadi, baik skenario optimis, moderat, maupun pesimis.

d. *Deciding* (Pengambilan Keputusan)

Tahap ini melibatkan evaluasi skenario yang telah dibuat untuk menentukan strategi atau keputusan terbaik yang mampu menghadapi berbagai kemungkinan masa depan yang diputuskan secara bersama-sama. Hal ini menjabarkan misi untuk membuat kebijakan (Pinkan Martha et al., 2014). Dalam tahap ini, dipilih strategi yang paling memungkinkan untuk dijalankan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, kesiapan lembaga pelaksana dan kondisi masyarakat. Evaluasi juga memperhitungkan risiko dari masing-masing skenario dan bagaimana strategi terpilih mampu mengantisipasi kemungkinan terburuk.

e. *Action* (Tindakan)

Tahap akhir yaitu implementasi strategi yang dipilih menjadi tindakan nyata dari perencanaan sebelumnya. Acting mencakup pelaksanaan rencana strategis serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan implementasi tetap relevan (Pinkan Martha et al., 2014). Dalam konteks program BLT, tahap ini mencakup penyusunan rencana aksi yang rinci dan terukur, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-langkah tersebut bisa meliputi perbaikan mekanisme pendataan penerima bantuan, digitalisasi sistem penyaluran, pelatihan bagi aparatur

pelaksana, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Selain itu, perlu dilakukan pelibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam proses pelaksanaan agar program berjalan transparan dan partisipatif. Evaluasi berkala terhadap implementasi juga menjadi bagian penting agar pelaksanaan tetap relevan dengan dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan difokuskan pada Perencanaan Skenario Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kota Surabaya dengan studi pada Kecamatan Krembangan dengan menggunakan pendekatan teori perencanaan skenario Taida yang dikembangkan oleh (Mats Lindgren & Bandhold, 2003). Teori Taida merupakan pendekatan sistematis dalam perencanaan strategi berbasis skenario, yang terdiri dari lima aspek utama, yaitu *Tracking*, *Analysing*, *Imaging*, *Deciding* dan *Acting*. Peneliti memilih lokasi penelitian berdasarkan tema yang diangkat yaitu di Kota Surabaya dan Situs Penelitian di Dinas Sosial Kota Surabaya dan Kecamatan Kremabangan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, instansi ini juga memiliki otoritas terhadap data kependudukan dan kemiskinan, serta akses terhadap sistem distribusi bantuan sosial di wilayah Kota Surabaya, Kecamatan Krembangan di pilih sebagai situs penelitian karena penerima BLT yang cukup banyak di Kota Surabaya. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dengan cara wawancara langsung tentang BLT. Sedangkan Data Sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku, jurnal dan data-data dari instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data yang pertama pengumpulan data, Kondensasi data, Penyajian data dan terakhir Penarikan kesimpulan.

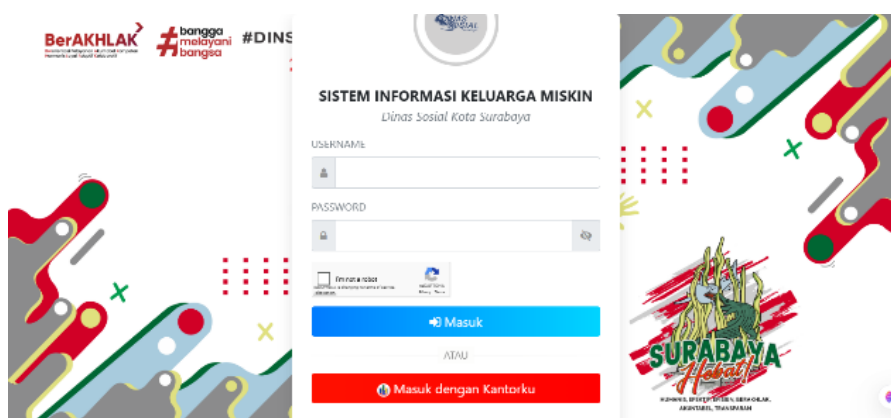
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini akan membahas hasil temuan penelitian berdasarkan tahapan dalam perencanaan skenario menurut Mats Lindgren and Bandhold (2003), dimulai dari tahap *Tracking*, *Analysing*, *Imaging*, *Deciding* dan *Acting*. Pembahasan difokuskan pada analisis penerapan perencanaan skenario dalam program BLT di Kecamatan Krembangan.

Tracking

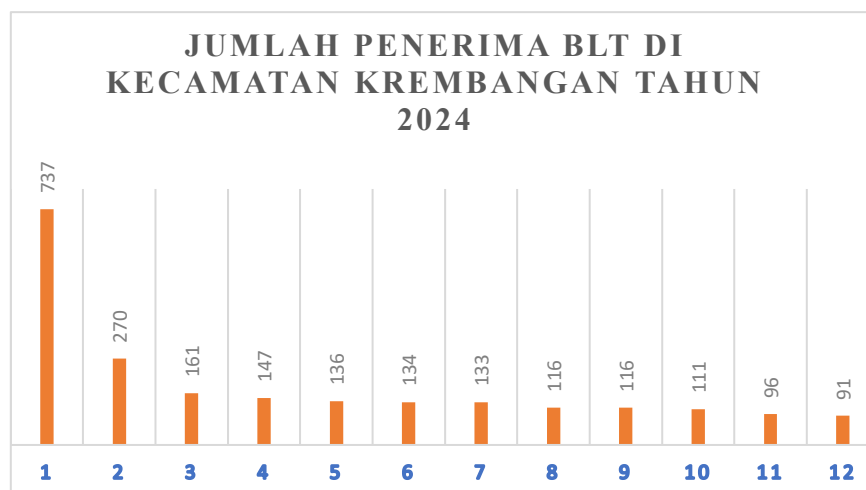
Tahap *Tracking* merupakan proses awal dalam perencanaan skenario menurut Mats Lindgren and Bandhold (2003), teori ini berfungsi untuk proses pengumpulan informasi dan indentifikasi tren yang berpengaruh terhadap kebijakan yang dirancang. Pada konteks penelitian ini, tahap *Tracking* berfungsi sebagai pijakan awal bagi pemerintah untuk memahami dinamika lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang melatarbelakangi kebijakan. Tahap *Tracking* ini dilakukan melalui pengumpulan data sosial ekonomi masyarakat, termasuk pendataan, pekerjaan dan kondisi tempat tinggal yang menjadi dasar dalam menentukan kelompok sasaran penerima BLT. Dalam konteks penelitian ini, tahap Tracking berperan penting dalam memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin di Kota Surabaya, khususnya di Kecamatan Krembangan, yang kemudian menjadi dasar dalam perumusan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perubahan bentuk bantuan sosial dari program permakanan menjadi program BLT merupakan hasil evaluasi kebijakan yang menekankan pentingnya fleksibilitas bantuan agar dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara langsung. Pihak Dinas Sosial Kota Surabaya menjelaskan bahwa kebijakan ini dipilih karena bantuan dalam bentuk uang tunai dianggap lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan yang beragam, seperti bahan pokok, biaya kesehatan, hingga pendidikan anak. Proses penentuan penerima bantuan dilakukan secara berjenjang melalui RT/RW, kelurahan, kecamatan dan diverifikasi ulang oleh Dinsos menggunakan sistem aplikasi (Sistem Informasi Keluarga Miskin) “Si Gamis”. Pendataan ini disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan antara bantuan pusat dan bantuan daerah. Berikut merupakan tampilan halaman beranda aplikasi “ Si Gamis”



Gambar 2 Halaman Beranda Aplikasi Sistem Informasi Keluarga Miskin Dinas Sosial Dinsos Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil Penelitian Alvira Tindi Sa'adah et al. (2023) yang meneliti implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Semampir. Mereka menemukan bahwa keberhasilan program sosial sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas instansi dan tingkat komunikasi dengan masyarakat penerima. Dalam kasus PKH maupun BLT, proses sosialisasi yang tidak merata sering kali menimbulkan kesalahpahaman terhadap maksud dan tujuan program. Selain itu, penelitian Umar Sako et al (2024) tentang Perencanaan Skenario Pengembangan Wisata Benteng Otanaha menekankan bahwa pada *Tracking* berperan penting dalam membaca tren dan dinamika lokal yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Pendekatan ini sangat relevan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menyesuaikan kebijakan sosial dengan karakteristik masyarakat perkotaan yang heterogen, seperti di Kecamatan Krembangan yang memiliki kepadatan tinggi dan tingkat



Gambar 3 Jumlah Penerima BLT di Kecamatan Krembangan Tahap 1-12 Tahun 2024.

kemiskinan yang beragam. Data dan informasi yang dikumpulkan pada tahap *Tracking* berperan penting sebagai pondasi di tahap-tahap perencanaan kebijakan selanjutnya. Tahap ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Kota Surabaya berhasil melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin pasca pandemi dan menyesuaikan bentuk bantuan sesuai kebutuhan. Melalui pendataan melalui sistem digitalisasi “Si Gamis”, kebijakan BLT di Kecamatan Krembangan sudah mencerminkan implementasi tahap *Tracking* dalam teori Perencanaan Skenario Mats Lindgren and Bandhold (2009) dalam tahap Taida, yaitu memahami realistis lapangan secara faktual dan komprehensif sebelum menentukan arah kebijakan baru.

Pada grafik tersebut menunjukkan jumlah penerima BLT di Kecamatan Krembangan selama tahun 2024 yang terbagi dalam 12 Tahap penyaluran pada lima kelurahan, yaitu

Kelurahan Dupak, Kemayoran, Krembangan Selatan, Morokrembangan dan Perak Barat. Secara umum, jumlah penerima mengalami penurunan di setiap tahap, di mana pada tahap pertama mencatat jumlah penerima terbanyak dan selanjutnya menurun secara bertahap sampai pada tahap akhir. Penurunan ini menunjukkan adanya proses verifikasi dan penyempurnaan data penerima agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Dalam implementasi pada tahap *Tracking* Dinsos Kota Surabaya sudah menunjukkan arah yang tepat melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis digital. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam aspek partisipasi sosial dan validasi lapangan yang lebih menyeluruh agar kebijakan tidak hanya berbasis data administratif, tetapi juga mencerminkan realitas sosial masyarakat penerima manfaat. Sebagai rekomendasi, tahap *Tracking* di masa depan sebaiknya memperkuat pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pendataan dan verifikasi. Forum musyawarah kelurahan (Muskel) dapat dioptimalkan sebagai wadah validasi terbuka, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga subjek yang turut menentukan akurasi data penerima. Selain itu, integrasi data antara “Si Gamis” dan DTKS perlu diperkuat melalui sinkronisasi rutin dan audit data lintas instansi agar tidak terjadi tumpang tindih penerima. Dengan memperkuat aspek ini, tahap *Tracking* tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga menjadi fondasi strategis dalam membangun kebijakan sosial yang adaptif, akurat, dan inklusif.

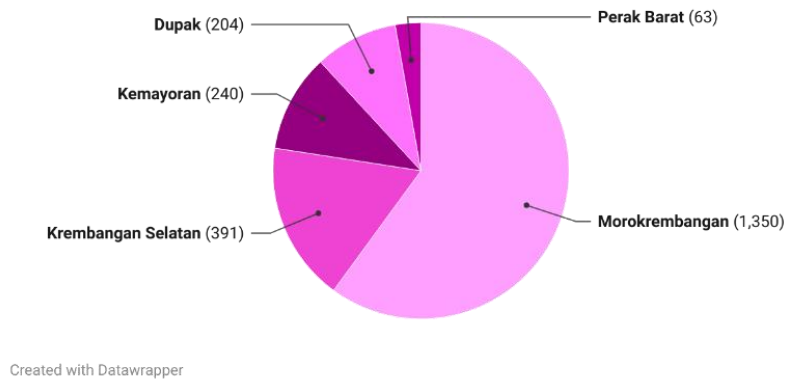
Analysing

Dalam teori Taida menurut Mats Lindgren and Bandhold (2003) yang menekankan pada analisis mendalam terhadap hasil *Tracking* sebelumnya, tahap *Analysing* menekankan pentingnya memahami akar permasalahan dan tantangan serta pola hubungan antara berbagai faktor yang mungkin muncul dari kebijakan yang telah diidentifikasi. Dalam teori ini, tahap *Analysing* menuntut adanya pemetaan terhadap faktor pendorong (*driving forces*) dan ketidakpastian kritis (*critical uncertainties*), yaitu faktor pendorong dan ketidakpastian yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam penelitian ini, faktor pendorongnya adalah kebijakan pemerintah dan koordinasi antarinstansi, sedangkan ketidakpastiannya terletak pada respon masyarakat terhadap program pemberdayaan pasca bantuan. Berikut disajikan data jumlah penerima BLT di Kecamatan Krembangan sebagai landasan analisis mengenai kondisi penerima manfaat

Berdasarkan hasil temuan dilapangan di Kecamatan Krembangan, ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami tujuan utama perubahan program permakanan menjadi BLT. Dinsos telah melakukan sosialisasi melalui kelurahan dan RT/RW, namun partisipasi masyarakat penerima masih sebagian di antaranya tidak mengikuti

sosialisasi karena merupakan penerima baru. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih bergantung pada bantuan BLT, terutama kelompok usia produktif. Mereka menganggap BLT sebagai pendapatan tetap, bukan bantuan sementara. Menurut Ibu Anisya dari Dinsos Kota Surabaya, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan semangat kemandirian dari penerima bantuan.

[Jumlah Penerima BLT di Kecamatan Krembangan]



Gambar 4 Jumlah Penerima BLT di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya.

Hal ini memperkuat hasil penelitian Wahyu Muh Syata (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas bantuan sosial akan menurun jika tidak disertai program pemberdayaan ekonomi. Menurut penelitian Alvira Tindi Sa'adah et.al (2024) dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Semampir juga menunjukkan bahwa koordinasi antar aktor kebijakan belum sepenuhnya berjalan efektif karena minimnya forum evaluasi antar instansi. Hal ini sejalan dengan kondisi Surabaya, di mana koordinasi antara Dinsos, kecamatan, dan kelurahan cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek partisipatif masyarakat. Sementara itu, dari sisi kelembagaan, pihak kecamatan dan kelurahan menghadapi kendala sinkronisasi data antarinstansi dan perbedaan waktu pembaruan data di aplikasi "Si Gamis" yang mempengaruhi ketepatan sasaran penerima.

Hasil analisis ini mendukung teori Mats Lindgren and Bandhold bahwa tahap *Analysing* harus mampu mengidentifikasi *critical uncertainties* yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ketergantungan sosial, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang harus dikelola agar program BLT lebih efektif dan berkelanjutan. Ketergantungan sosial masyarakat miskin, lemahnya koordinasi antar instansi dan rendahnya partisipasi masyarakat merupakan bentuk ketidakpastian yang

perlu diantisipasi. Sementara itu, kebijakan daerah yang progresif dan penggunaan sistem digital seperti “Si Gamis” menjadi *driving forces* yang mendorong efisiensi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan kedua faktor tersebut mengoptimalkan *driving forces* sekaligus meminimalkan *critical uncertainties* agar kebijakan sosial dapat berjalan efektif dan adaptif.

Dengan demikian sebagai bentuk evaluasi dan rekomendasi, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan tahap *Analysing* di masa mendatang. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi publik melalui forum diskusi dan sosialisasi, mensinkronisasikan data antarinstansi yang harus diperkuat dengan sistem integrasi *real time* antara aplikasi “Si Gamis” dan DTKS, sehingga pembaruan data dapat diminimalisir, selanjutnya diperlukan pendekatan edukatif bagi penerima bantuan yang di usia produktif, seperti pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan keluarga dan pendampingan UMKM agar bantuan tidak bersifat konsumtif, pembentukan forum lintas instansi secara berkala dapat menjadi wadah koordinasi dan evaluasi partisipatif yang melibatkan Dinsos, kecamatan, kelurahan, serta masyarakat penerima manfaat. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, pelaksanaan tahap *Analysing* dalam program BLT di Kota Surabaya diharapkan dapat berjalan lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial di lapangan. Analisis yang lebih mendalam terhadap data, partisipasi masyarakat, dan efektivitas koordinasi antarinstansi akan membantu pemerintah memahami pola permasalahan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi administratif tetapi juga dari aspek sosial-ekonomi penerima manfaat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Scenario Planning* yang menekankan pentingnya kemampuan antisipatif dalam merespons ketidakpastian kebijakan. Dengan demikian, hasil analisis yang dihasilkan tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi dasar dalam merancang langkah strategis selanjutnya agar kebijakan BLT di Kota Surabaya semakin tepat sasaran, berkeadilan, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.

Imaging

Tahap imaging dalam teori Perencanaan Skenario Mats Lindgren dan Hans Bandhold (2003) berperan penting dalam membentuk gambaran di masa depan yang diharapkan. Tahap ini bukan hanya merancang visi ideal, tetapi juga menghubungkan hasil analisis sebelumnya dengan langkah strategis yang akan diambil. Dinsos Kota Surabaya memiliki visi agar program BLT mampu bertransformasi menjadi program mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Program BLT diharapkan dapat menjadi jembatan menuju pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan program pendamping seperti pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM,

bantuan modal usaha dan kerja sama dengan Baznas serta BPS menjadi bagian dari visi ini. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *Imaging* dalam teori Taida, yaitu membayangkan masa depan yang diinginkan dan menentukan arah strategi kebijakan melalui pengembangan kapasitas penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat di Kecamatan Krembangan menunjukkan perbedaan sudut pandang. Bahwa tidak semua penerima BLT mampu mewujudkan harapan tersebut. Sebagian besar masyarakat penerima manfaat memandang BLT sebagai bantuan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan sebagai modal pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara visi pemerintah dengan realistis penerima manfaat. Pemerintah Kota Surabaya menginginkan agar BLT berfungsi sebagai jembatan menuju kemandirian ekonomi, sedangkan sebagian penerima justru menilai bantuan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah terhadap kelompok miskin. Beberapa penerima bahkan mengungkapkan bahwa mereka belum pernah memperoleh pendampingan atau pelatihan yang dapat membantu memanfaatkan dana BLT secara produktif. Akibatnya, setelah dana bantuan habis digunakan untuk kebutuhan pokok, tidak ada nilai tambah ekonomi yang tercipta. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat literasi finansial masyarakat penerima BLT masih tergolong rendah. Minimnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, investasi kecil, dan potensi usaha mandiri menyebabkan mereka sulit mengubah bantuan konsumtif menjadi modal produktif.

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Ade Daoed Saputra et al (2022) yang menemukan bahwa penerima BLT cenderung bergantung pada bantuan dan belum sepenuhnya memahami tujuan jangka panjang dari program tersebut. Selain itu menurut, penelitian Raphael Anammasiya Ayambire dan Markus Moos (2024) mengenai *inclusive futures in scenario planning*, yang menekankan bahwa visi masa depan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun makna dan arah perubahan. Artinya, tahap *Imaging* bukan sekadar menciptakan cita-cita kolektif, tetapi juga membangun kesepahaman bersama antara pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai pelaku perubahan.

Secara teori, tahap *Imaging* dalam Taida berfungsi untuk membayangkan berbagai kemungkinan masa depan dengan membangun “gambar ideal”. Pemerintah Surabaya telah memiliki gambaran ideal tentang masyarakat yang mandiri, namun perlu memperkuat strategi komunikasi dan pendamping agar visi tersebut dipahami oleh penerima bantuan. Tahap ini menegaskan pentingnya penyelarasan visi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan arah strategis menuju pemberdayaan masyarakat, namun tingkat

keberhasilan masih bergantung pada perubahan mindset masyarakat. Pelaksanaan masih memerlukan penguatan dari sisi pendampingan, edukasi finansial, serta sinergi antarinstansi agar visi kemandirian ekonomi benar-benar dapat tercapai.

Untuk memperkuat tahap ini, Pemerintah Kota Surabaya perlu mengembangkan mekanisme komunikasi dan pendampingan berbasis komunitas agar visi kemandirian dapat terinternalisasi secara menyeluruh. Pendekatan kolaboratif antara Dinsos, kelurahan, lembaga keuangan mikro, dan sektor swasta dapat menjadi strategi yang efektif untuk membangun ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak jangka panjang program BLT, dengan menambahkan indikator capaian non-material seperti peningkatan kesadaran kemandirian dan partisipasi ekonomi masyarakat. Dengan langkah tersebut, tahap *Imaging* dalam implementasi BLT tidak hanya menjadi simbol harapan, tetapi benar-benar menjadi kerangka strategis dalam mengubah ketergantungan menjadi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di Kota Surabaya.

Deciding

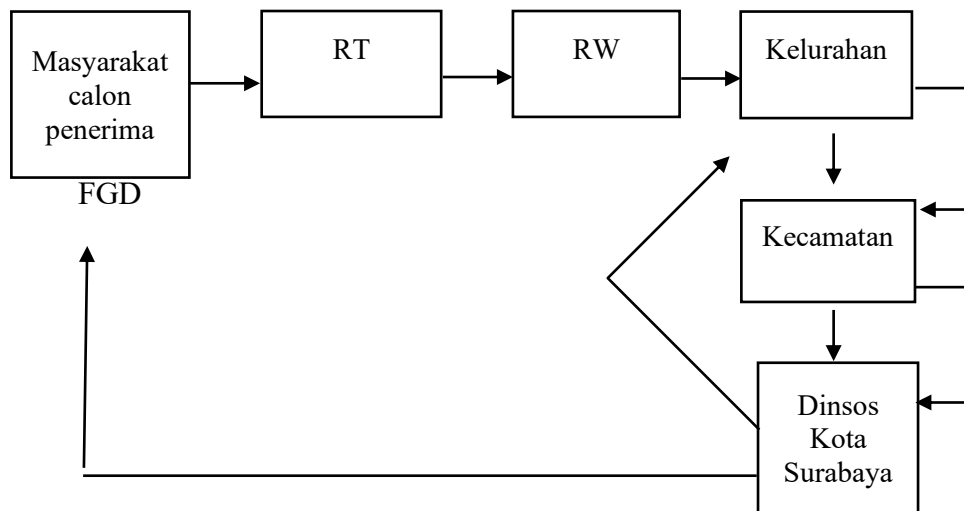
Menurut Mats Lindgren & Bandhold (2003), *Deciding* merupakan proses pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan program BLT di Kota Surabaya, tahap ini memiliki peran penting karena pada tahap ini kebijakan ditetapkan mulai dari penentuan kriteria penerima, mekanisme verifikasi hingga proses persetujuan akhir oleh instansi yang berwenang. Dalam implementasi BLT di Surabaya dilakukan melalui koordinasi berjenjang antara RT/RW, kelurahan, kecamatan dan Dinsos. RT/RW menjadi sumber data awal karena mereka dianggap paling memahami kondisi sosial ekonomi warganya. Data tersebut kemudian diverifikasi di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memastikan keakuratan dan kelayakan penerima bantuan. Selanjutnya, hasil verifikasi dikirimkan ke Dinas Sosial untuk proses validasi akhir melalui sistem Sistem Informasi Keluarga Miskin (“Si Gamis”).

Kriteria penerima ditetapkan berdasarkan data “Si Gamis”, meliputi pendapatan per kapita di bawah Rp750.000, kondisi tempat tinggal tidak layak huni seperti, dinding bambu atau tembok belum di plester, atap asbes atau seng, lantai tanah atau semen, serta sanitasi dan sumber air yang tidak memadai. Sementara menurut BPS, ditentukan berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan Rp. 600.000 – Rp. 700.000 di wilayah perkotaan Jawa Timur dan juga dilihat luas lantai kurang dari 8m² per orang, Kondisi rumah seperti jenis lantai, dinding dan atap, akses air bersih, pendidikan, kesehatan dan kepemilikan aset. Secara umum, kriteria yang digunakan oleh “Si Gamis” dan BPS tidak jauh berbeda, karena keduanya sama sama menilai dari aspek ekonomi, kondisi tempat tinggal dan kesejahteraan keluarga.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa penentuan penerima BLT di Kota Surabaya telah disusun berdasarkan prinsip yang sejalan dengan standar nasional, terutama dalam proses validasi dan pengambilan keputusan. Pendekatan berjenjang ini merupakan bentuk konkret dari prinsip *scenario planning*, yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan masukan dari banyak aktor yang berbeda. Berdasarkan hasil temuan di lapangan di Kecamatan Krembangan dan Kelurahan Morokrembangan, bahwa proses pengambilan keputusan dalam program BLT belum sepenuhnya partisipatif. Masyarakat tidak sepenuhnya terlibat dalam Muskel, sehingga menimbulkan persepsi kurang terbuka dalam proses seleksi. Teori Lindgren & Bandhold menekankan bahwa tahap *Deciding* harus didasarkan pada kolaborasi lintas aktor dan partisipasi publik, agar keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

Prinsip ini sejalan dengan hasil penelitian Nia Eka Safitri (2024) yang menyatakan bahwa partisipasi warga dalam musyawarah dapat meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, menurut penelitian Imam Hanafi et al (2022) tentang Skenario Kebijakan Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Batu, yang menekankan bahwa dalam setiap tahap pengambilan keputusan kebijakan publik berbasis skenario diperlukan forum deliberatif yang memungkinkan partisipasi pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap realitas sosial. Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam meningkatkan legitimasi keputusan pemerintah. Dalam konteks ini, pelaksanaan tahap *Deciding* di Kota Surabaya sudah menunjukkan koordinasi vertikal yang baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada dimensi horizontal, yakni interaksi langsung antara pembuat kebijakan dan warga penerima manfaat.

Tahap *Deciding* dalam pelaksanaan program BLT di Kota Surabaya menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada sistem administratif yang terstruktur, tetapi juga pada integrasi nilai partisipatif, transparansi, dan keadilan sosial. Hasil ini memperkuat teori perencanaan skenario menurut Lindgren & Bandhold (2003), bahwa keputusan strategis harus diambil dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan sosial dan kemungkinan perubahan di masa depan. Oleh karena itu, penguatan sistem digital, keterlibatan masyarakat, dan pembaruan data secara berkala menjadi kunci utama agar kebijakan BLT dapat lebih adaptif, akurat, dan berkelanjutan. Berikut disajikan alur koordinasi dalam pengambilan keputusan penerima program BLT:



(Verifikasi dan Validasi)

Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinsos Kota Surabaya perlu memperkuat mekanisme *bottom-up* dalam pengambilan keputusan program BLT, misalnya dengan memperluas forum Muskel agar melibatkan perwakilan penerima bantuan secara langsung sebagai bentuk transparansi publik. Selain itu, pengembangan sistem digital seperti “Si Gamis” perlu disertai fitur interaktif seperti pelaporan masyarakat agar proses validasi menjadi transparan. Pendampingan sosial juga penting diperkuat agar warga memahami dasar kebijakan serta tujuan jangka panjang program, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi turut berperan aktif dalam proses evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan memperkuat aspek partisipasi, keterbukaan data, dan komunikasi sosial, tahap Deciding diharapkan dapat lebih selaras dengan prinsip Scenario Planning yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Acting

Implementasi program BLT menurut teori perencanaan skenario yang dikemukakan oleh Mats Lindgren dan Hans Bandhold (2003). Pada tahap ini, seluruh rencana strategis yang telah dirumuskan pada tahap-tahap sebelumnya diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret. Tujuannya adalah memastikan skenario yang telah disusun benar-benar dapat diterapkan di lapangan, sekaligus mengevaluasi efektivitasnya dalam menjawab masalah yang ada. Dengan demikian, Acting bukan hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada penilaian hasil dan penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dengan kondisi nyata.

Dalam implementasi BLT di Kota Surabaya, tahap *Acting* tercermin pada koordinasi antara Dinsos, kecamatan, kelurahan dan RT/RW untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, proses pelaksanaan telah diatur secara sistematis mulai dari verifikasi data penerima, penjadwalan pencairan dan mekanisme distribusi bersama pihak

Bank Jatim sebagai penyalur dana. Petugas Dinsos di lapangan juga menjadi bentuk pengawasan langsung agar proses berjalan tertib dan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Penerima mendapatkan undangan resmi yang berisi jadwal dan lokasi pencairan, serta dapat mengambil bantuan dengan membawa KTP dan KK. Untuk lansia dan difabel, bantuan dapat diantar langsung ke rumah.

Meskipun pelaksanaan BLT di Kecamatan Krembangan berjalan relatif tertib dan terkoordinasi, masih terdapat sejumlah kendala teknis yang teridentifikasi. Beberapa penerima melaporkan keterlambatan pencairan di bulan tertentu, antrean panjang saat pengambilan bantuan, serta keterbatasan sarana komunikasi mengenai jadwal distribusi. Sebagian warga bahkan merasa informasi yang diterima masih kurang cepat dan tidak merata antarwilayah. Walaupun pihak Dinas Sosial membantah adanya keterlambatan secara sistemik dan menyatakan proses berjalan sesuai jadwal, persepsi masyarakat menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam aspek transparansi dan manajemen distribusi bantuan. Pelaksanaan dan evaluasi tersebut menggambarkan prinsip dalam teori Mats Lindgren dan Hans Bandhold (2003) bahwa pada tahap *Acting* harus bersifat dinamis dan berorientasi.

Dalam penelitian Ade Daoed Saputra (2022) menegaskan bahwa efektivitas program BLT sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi dan evaluasi berkelanjutan di tingkat kelurahan. Menurut hasil penelitian Khoirun Nisak dan Abdul Latib (2024) yang mengidentifikasi bahwa efektivitas program BLT sangat ditentukan oleh kecepatan birokrasi dan sistem pengawasan distribusi di tingkat kelurahan. Sementara itu, penelitian Marte Luesink et al. (2024) mengenai *Scenario Planning in Crisis Management* menekankan bahwa keberhasilan tahap implementasi kebijakan publik bergantung pada kemampuan adaptif lembaga pemerintah untuk merespons perubahan kondisi sosial secara cepat melalui mekanisme evaluasi yang fleksibel.

Berdasarkan teori dan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap *Acting* dalam implementasi BLT di Kota Surabaya telah mencerminkan sebagian prinsip utama dalam Perencanaan Skenario, yakni koordinasi lintas sektor, fleksibilitas pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi berjenjang. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *feedback* partisipatif yang melibatkan penerima manfaat secara langsung. Kondisi ini menyebabkan proses distribusi bantuan belum sepenuhnya efisien, terlihat dari masih adanya antrean panjang, keterlambatan pencairan, serta kurang optimalnya komunikasi mengenai jadwal dan lokasi penyaluran bantuan.

Oleh karena itu, Untuk mengatasi kendala teknis seperti keterlambatan pencairan, antrean panjang, dan ketidakaturan jadwal distribusi, Pemerintah Kota Surabaya perlu

memperkuat sistem koordinasi antara Dinas Sosial, pihak perbankan, dan perangkat wilayah. Salah satu rekomendasi yang dapat diterapkan adalah pengaturan jadwal pencairan secara bergilir di setiap kelurahan atau wilayah RW, agar jumlah penerima di lokasi pencairan tidak menumpuk pada waktu yang sama. Selain itu, penerapan inovasi digital seperti sistem pemberitahuan otomatis kepada penerima manfaat dan mekanisme pelaporan kendala secara daring dapat membantu pemerintah memantau pelaksanaan secara *real time* dan menindaklanjuti hambatan dengan lebih cepat. Dengan langkah-langkah tersebut, tahap *Acting* diharapkan tidak hanya menjadi pelaksanaan teknis, tetapi juga wadah umpan balik dinamis yang mendorong perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan bantuan sosial di Kota Surabaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan skenario Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya telah menerapkan prinsip-prinsip *Scenario Planning* menurut Mats Lindgren dan Hans Bandhold (2003) yang meliputi tahap Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, dan Acting. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial telah berupaya mewujudkan kebijakan berbasis data digital melalui sistem *Si Gamis* dan melakukan koordinasi berjenjang dari tingkat RT/RW hingga kota. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan yang adaptif dan terukur dalam upaya mengurangi kemiskinan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah, kesenjangan informasi, ketergantungan terhadap bantuan, serta hambatan teknis berupa antrean panjang dan keterlambatan pencairan. Selain itu, masih terdapat perbedaan orientasi antara visi pemerintah yang menekankan kemandirian ekonomi dan persepsi masyarakat yang melihat BLT sebagai bantuan konsumtif. Oleh karena itu, efektivitas program ini sangat bergantung pada penguatan komunikasi publik, sinkronisasi data antarinstansi, transparansi pelaksanaan, serta pendampingan berkelanjutan bagi penerima manfaat. Dengan memperkuat aspek partisipatif dan sistem evaluasi yang responsif, program BLT diharapkan dapat berkembang menjadi instrumen kebijakan strategis yang tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kota Surabaya.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Sosial Kota Surabaya bersama pihak Kecamatan Krembangan perlu melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses Musyawarah Kelurahan (Muskel) di lima kelurahan yaitu, Kelurahan Dupak, Kemayoran, Krembangan Selatan, Morokrembangan dan Perak Barat. Supaya penerima manfaat dapat memberikan masukan langsung terkait validasi data dan pelaksanaan program sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih transparan dan berkeadilan.
- b. Dinas Sosial perlu melakukan integrasi secara rutin antara “Si Gamis” dan DTKS agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima bantuan, serta memastikan proses pembaruan data dilakukan secara berkala dan akurat.
- c. Dinas Sosial Kota Surabaya perlu menata kembali sistem penyaluran bantuan agar lebih efisien dengan menerapkan jadwal bergilir per kelurahan atau RW untuk mengurangi antrean panjang, serta menggunakan pemberitahuan digital agar informasi penyaluran lebih efisien diterima masyarakat.
- d. Dinas Sosial perlu memperkuat sinergi dengan lembaga-lembaga pemberdayaan seperti, Baznas melalui Dinas Tenaga Kerja dan Lembaga Keuangan Mikro agar pelaksanaan program pendampingan ekonomi bagi penerima BLT dapat berjalan lebih efektif.
- e. Dinas Sosial Kota Surabaya bersama Kecamatan Krembangan perlu membangun forum evaluasi yang melibatkan aparat daerah, akademisi dan masyarakat penerima manfaat untuk menilai efektivitas program secara berkala, serta memastikan bahwa hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan BLT di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Badan Pusat Statistik Kota Surabaya*. Berita Resmi Statistik, 36, 1–16.
- Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Elaine, M. (2024). DPRD minta penyaluran BLT permakanan tepat sasaran, Pemkot minta kejujuran warga tolak bansos ganda. *Suarasurabaya*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/dprd-minta-penyaluran-blt-permakanan-tepat-sasaran-pemkot-minta-kejujuran-warga-tolak-bansos-ganda/>

- HAFIZ, M. (2022). *Implementasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Hajra, S. (2022). *Penanggulangan kemiskinan: Antara pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)*. Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.
- Irfan, A. (2025). BPS sebut kriteria masyarakat miskin prioritas penerima bansos PKH BPNT tahap 2 tahun 2025. *Klik Bantuan*. <https://www.klikbantuan.com/bantuan-sosial/103914783659/bps-sebut-14-kriteria-masyarakat-miskin-prioritas-penerima-bansos-pkh-bpnt-tahap-2-tahun-2025-cek-daftar-rincian?page=2>
- Kurniasih Anderesta. (2019). *Pengaruh bantuan sosial dan tingkat inflasi terhadap kemiskinan seluruh provinsi di Indonesia tahun 2007–2017*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lindgren, M., & Bandhold, H. (2003). *Scenario planning - Revised and updated: The link between future and strategy*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230233584>
- Melinda, M. (2023). Faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2021. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1).
- Mualifah, N. (2019). Dampak kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Bumi Raharjo dalam perspektif ekonomi Islam. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*.
- Mungkasa, O. (2023). *Perencanaan skenario (Scenario planning): Konsep dasar, pembelajaran dan agenda strategis*. 1–50.
- Nasution, H. F. (2025). BLT untuk kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan. *DJBP Kemenkeu*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/balige/id/data-publikasi/artikel/2918-blt-untuk-kesejahteraan-masyarakat-miskin-pedesaan.html>
- Nurvira. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia [Universitas Malikussaleh]. *Rama.unimal.ac.id*, 33(1). <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2541/>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021). *Salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026*. JDIH Pemerintah Kota Surabaya. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/3933>
- Pinkan Martha Hella, & Santoso Haryono, S. (2014). Perencanaan skenario kesiapsiagaan terhadap bencana alam di wilayah pesisir Kabupaten Malang (Studi pada Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1924–1929.